PERENCANAAN DISTRIBUSI ZAKAT PADA DOMPET PEDULI UMMAT DARUT TAUHID (DPU DT) CABANG YOGYAKARTA

Ibrahim

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
komputaksi@gmail.com

Abstrak

Lembaga yang diamanahi untuk mengelola zakat, berperan untuk melakukan pendistribusian zakat secara lebih baik lagi, melalui sentuhan manajemen pendistribusian zakat yang profesional. Langkah awal dalam mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan perencanaan yang baik, matang, dan mendalam sehingga dapat menghadirkan nilai-nilai kemaslahatan dari disyariatkannya ibadah zakat. Tulisan ini akan menganalisis perencanaan distribusi zakat yang dilakukan oleh Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid (DPU DT) cabang Yogyakarta sesuai dengan konsep manajemen perencanaan. DPU-DT cabang Yogyakarta dalam mendistribusikan dana zakat, telah menggunakan sentuhan manajemen yang baik, salah satunya telah menggunakan tahapan dan proses manajemen perencanaan yang meliputi tahapan *forcessing*, *objective*, *police*, *program*, *procedure*, *schedule*, dan *budget*. Dengan tetap berpedoman pada visi, misi, dan tujuan DPU-DT cabang Yogyakarta yaitu mengantarkan *mustahik* menjadi *muzakki*. Selain itu juga membawa misi memperdayakan dan merubah mental ekonomi masyarakat, serta menyiarkan nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan pembinaan agama dalam rangka menguatkan keimanan masyarakat.

Kata Kunci: Zakat, Manajemen, Distribusi, Ekonomi

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrument dalam ekonomi Islam yang menjadi potensi mengangkat derajat kaum lemah dan model penyeimbang ekonomi yang dapat menjembatani antara para *agniya* dan kaum *mustad'afin* dalam menekan ketimpangan pendistribusian harta.¹ Zakat adalah ibadah *maaliah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, startegis dan menentukan,² baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.³

Zakat tidak hanya mengandung muatan *Ibadah Mahdhah* secara sempit, tapi juga sarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi. Zakat diharapkan menjadi suatu sistem yang secara

¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: HTI Press), 45.

² Yusuf al-Qardawi, *Al-Ibadah fil Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 235.

³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 231.

Perencanaan Distribusi Zakat pada Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid (DPU DT) Cabang Yogyakarta (Ibrahim)

struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian yang akan memberikan dampak kesejahteraan dan kemakmuran bagi orang banyak masyarakat.

Secara teoretis, zakat diproyeksikan untuk mencapai beragam tujuan strategis, diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan para mustahik (penerima zakat) terutama fakir-miskin, meningkatkan etos kerja, aktualisasi potensi dana untuk membangun umat, membangun sarana pendidikan yang unggul tetapi murah, sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi publikasi dan komunikasi, meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial seseorang, menciptakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup, menumbuhkan kembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya, mendorong pelaksanaan ibadah *mahdhah*, adanya *sharing economy*, serta mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi di tengah masyarakat.⁴

Ditengah keindahan dan kemaslahatan ibadah zakat yang telah digambarkan sebelumnya, namun diranah realitasnya (*Das Sein*) terdapat beberapa masalah yang merusak dan membuat citra ibadah zakat di Indonesia belum maksimal dan belum terasa kemaslahatannya. Beberapa faktor diantaranya adalah; pertama, potensi zakat di Indonesia menunjukkan angka yang sangat fantastis namun berbanding terbalik dengan penerimaan zakat.⁵

Kedua; Tampaknya nilai-nilai altruistik dalam zakat juga belum banyak tertangkap. Hal ini dapat dilihat dari mulai kasus ricuh dan anarki ketika pembagian zakat secara langsung.⁶ Malapetaka yang menodai kemuliaan ibadah zakat tersebut seharusnya menjadi pembelajaran semua pihak. Fenomena dalam pendistribusian zakat dengan cara mengundang mustahik untuk datang secara masal ke rumah ini merupakan fenomena yang tidak sehat. Sehingga mereka berdesak-desakan di halaman atau sampai mengantri dibawah terik matahari, ini adalah salah satu contoh pendistribusian zakat yang tidak mendidik, hal ini mengikis sifat *iffah* (kesucian) yang merupakan akhlakul karimah (sikap yang baik).

Ketiga, kebanyakan organisasi amil belum professional sehingga rawan penyelewengan dana publik. Keempat, belum terlihat kearifan dana zakat dalam memperdayakan kaum lemah dalam rangka mengatasi penyakit kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan kesejahteraan. Disisi lain, keinginan masyarakat untuk berderma, bermurah hati untuk berbagi pada seseorang, kelompok dan organisasi sangat dipengaruhi oleh citra atau pandangan yang melekat pada lembaga tersebut. Orang tidak akan mau berderma apabila

⁴Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet I, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2002), 9.

⁵Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan IPB dalam penelitian tahun 2012 menyatakan potensi zakat secara nasional diperkirakan mencapai Rp 217 triliun setahun. Namun laporan penerimaan zakat tahun 2011 oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu BAZNAS, BAZ Daerah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) baru terhimpun Rp. 1.8 Triliun.

⁶Pada tahun 2008 di Pasuruan, Jatim, memakan 21 korban jiwa.

ia melihat bahwa dana yang diberikannya tidak sampai pada apa yang telah diniatkan. Selain itu, bantuan yang diberikan harus dikelola searif mungkin, dan dapat diberdayagunakan terhadap sasaran yang diinginkan si penderma.

Disinilah peran lembaga amil zakat dalam menjawab keraguan publik atas kerancuan dan ketidak arifan pengelolaan zakat yang berkembang selama ini. Seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat yang kurang terkoordinasi dan profesional. Bila pengumpulan zakat dapat dioptimalkan dan pengelolaan serta pendayagunaannya dilakukan dengan manajemen yang baik dan profesional, maka zakat dapat dijadikan sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sudah merupakan permasalahan kronis dalam perekonomian Indonesia.

Langkah awal dalam mewujudkan manajemen zakat yang baik dan professional yaitu melakukan kegiatan perencanaan yang matang dan mendalam sehingga nilai-nilai zakat yang telah di syariatkan oleh *Sang Khalik* dapat diwujudkan dan tercipta kemaslahatan bersama umat. Untuk itu tulisan ini akan membahas tentang bagaimana pola perencanaan pendistribusian zakat yang harus dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat sehingga pendistribusian zakat dapat dilakukan secara terstruktur dan tertata rapi, terlebih dahulu mempersiapkan dan merencanakan kegiatan tersebut dengan sematang-matangnya, sehingga target atau sasaran yang dituju oleh lembaga dapat tercapai.

Pengertian, Hukum dan Jenis Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti *al-ziadah* “menambah”, *al-barakatu* ”keberkahan”, *al-namaa* ”pertumbuhan dan perkembangan”, dan *ath-thaharatu* ”kesucian”. Sedangkan secara istilah *syara’* zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syara’*.⁷ Syarat harta yang dikeluarkan zakatnya yaitu cukup *nisab*, *haul* dan kadarnya.⁸

Dalam kamus terminologi umum, zakat diartikan sebagai suatu volume tertentu yang diambil dari jenis harta yang telah ditentukan untuk dibayarkan kepada pihak-pihak tertentu sebagai kewajiban harta yang merupakan salah satu rukun Islam yang legalitasnya diperoleh dari al-Qur’an, sunnah serta *ijma’* para ahli fikih (*fuqaha*). Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁹

Zakat menurut etimologi berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari

⁷Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 39.

⁸Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 18.

⁹Lihat pasal 1 ayat 3

Perencanaan Distribusi Zakat pada Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid (DPU DT) Cabang Yogyakarta (Ibrahim)

bahaya. Menurut Ibnu Taimiyah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Oleh karena itu setiap orang yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan agama wajib membayar zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok penegakan syariat Islam. Tegaknya syariat Islam di muka bumi ini dibuktikan dengan salah satunya adalah dilaksanakannya perintah berzakat oleh umat Islam. Zakat adalah *wajib ain (fardhu)* atas setiap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib sebagaimana ibadah shalat, puasa, dan haji yang telah diatur tata caranya secara rinci dan paten dalam berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

Zakat terbagi kedalam dua macam, yaitu Zakat *Nafs* (jiwa) atau juga disebut Zakat Fitrah dan Zakat *Maal* (harta). Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan, kepada setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan dan ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat sunah idul fitri.¹⁰ Zakat fitrah wajib bagi setiap yang memiliki kelebihan makanan pada hari dan malam idul fitri. Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah satu *sha'* atau 2,5 kg beras atau menurut mazhab Hanafi boleh dengan uang yang nilainya setara dengan satu *sha'* atau 2,5 kg beras.¹¹ Sedangkan zakat *maal* adalah zakat yang diwajibkan atas seseorang yang memiliki kelebihan harta sampai batas tertentu (*nisab*), selama waktu tertentu (*haul*), dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu pula.

Perbedaan zakat fitrah dengan zakat *maal* adalah zakat *fitrah* pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi setiap muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya. Sedangkan zakat *maal*, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasannya dan segala ketentuannya diatur oleh syariat berdasarkan dalil al-Qur'an dan as-Sunah.

Adapun jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-Qur'an dan hadis. Menurut Ibnul Qayyim pada dasarnya ada empat jenis, yaitu tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan.¹² Sementara itu, Al-jaziri¹³ dalam fiqih mazhab empat menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada lima macam, yaitu hewan ternak, emas dan perak, harta perdagangan, barang temuan dan barang tambang, dan tanam-tanaman serta buah-buahan.¹⁴ Az-Zuhaili dalam *al-Fiqih Islami wa 'Adillatuhu* menyatakan pula bahwa harta yang wajib

¹⁰Jafar Abd Al-Maqsuw, *Al-Fawatih Al-hija'iyah wa I'jaz Al-Qur'an*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka As-Sunah, 1995), 98.

¹¹Apri Purwanto, *Risalah Zakat*, Cet. I, (Yogyakarta: Penerbit DPU-DT, 2010), 15.

¹²Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 28.

¹³Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih 'Ala Mazahabi Al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Tijaariyyah Al Kubra, tt.), Juz 1, 596.

¹⁴Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 28.

dikeluarkan zakatnya itu adalah *nuqud* (emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, serta hewan atau binatang ternak.¹⁵

Dalam perkembangannya jenis harta yang menjadi sumber zakat tidak hanya meliputi jenis-jenis yang telah disebutkan diatas tetapi terdapat beberapa jenis zakat yang menurut ijtihad para ulama termasuk dalam kategori zakat *maal*, diantaranya adalah zakat profesi, perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan mata uang (money changer), hewan ternak yang diperdagangkan, madu dan produk hewani lain, serta zakat sektor modern lainnya.¹⁶

Konsep Pendistribusian Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang mengandung dimensi vertikal (manusia-Tuhan) dan horizontal (manusia-manusia) sekaligus. Secara vertikal, zakat adalah perintah Allah kepada manusia yang wajib ditunaikan dan itu sudah final (*tauqify*), tidak bisa ditawar-tawar lagi. Secara horizontal, pengelolaan zakat untuk disalurkan kepada yang berhak (*mustahik*) terbuka peluang untuk ijtihad (*ijtihady*). Aspek horizontal inilah yang perlu didiskusikan dan dikembangkan terus-menerus mengingat zakat memiliki potensi yang besar dalam mensejahterakan rakyat dan mengandung nilai *humanisme*.

Pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁷ Pendistribusian dan pendayagunaan merupakan inti dari seluruh kegiatan pengelolaan dana zakat. Jadi harus disadari bahwa keberhasilan badan pengelola zakat bukan semata-mata terletak pada kemampuannya dalam mengumpulkan dana zakat, tetapi juga pada kemampuan mendistribusikan dan mendayagunakannya.¹⁸ Namun sebelum tahap mendistribusikan dan mendayagunakan, diperlukan rencana yang matang dan tepat sehingga tercapai keindahan dan kemashlahatan dari perintah zakat.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa dana zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹⁹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan kebeberapa orang atau kebeberapa tempat.²⁰ Jadi pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak *muzakki* kepada pihak *mustahik* sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif.

¹⁵ *Ibid*, 29.

¹⁶ *Ibid*, 93.

¹⁷ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (1)*, 2.

¹⁸ Didin Hafiduddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani Press 2003), 247.

¹⁹ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 dan Pasal 26*.

²⁰ Pusat pembina dan pengembangan bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 209.

Perencanaan Distribusi Zakat pada Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid (DPU DT) Cabang Yogyakarta (Ibrahim)

Selanjutnya dijelaskan Dalam BAB 1 Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011, bahwa tugas dari Lembaga Amil Zakat adalah membantu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang di atas maka tugas pokok dari Lembaga Amil Zakat adalah :

1. Penghimpunan zakat dilakukan dengan cara menerima zakat dan dana keagamaan lainnya dari masyarakat. Untuk mendorong masyarakat mengeluarkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat
2. Pendistribusian atau pembagian zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan dengan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip dalam pendistribusian zakat. Ada delapan golongan menurut syariat Islam yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, hamba sahaya, ibnu sabil, amil zakat, mualaf, *gharim* serta orang yang berjuang di jalan Allah (*jihad fi sabillillah*).
3. Pendayagunaan dana zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program-program yang telah dirancang oleh Lembaga Amil Zakat, meliputi bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Jadi Perencanaan Distribusi Zakat dari beberapa pengertian sebelumnya dapat dirangkum menjadi: proses memikirkan dan pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara (strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, system, anggaran, dan standar yang dibutuhkan) yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, dalam rangka menyalurkan dana zakat yang diamanahkan *muzakki* ke Lembaga Amil Zakat kemudian di salurkan ke mustahik untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh lembaga pengelola zakat, *muzakki*, dan *mustahik*. Penilaian atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sesuai fungsi manajemen, sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Oleh karena itu, dalam aktivitasnya Lembaga Amil Zakat, dalam melakukan perencanaan zakat bertugas menentukan langkah (strategi) dan program dalam menentukan setiap sasaran, menentukan sarana-prasarana atau media, serta personel yang akan diterjunkan. Menentukan materi atau bentuk penyaluran yang cocok kepada penerima zakat untuk sempurnanya pelaksanaan, membuat asumsi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi yang kadang-kadang dapat mempengaruhi cara pelaksanaan program (prosedur) dan cara menghadapinya serta menentukan alternatif-alternatif, yang semua itu merupakan tugas utama dari sebuah perencanaan.

Menurut Yusuf Qardawi, *amil* adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Selain itu yang termasuk *amil* juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada *mustahiknya*. Salah satu aktivitas *amil* adalah melakukan kegiatan penggalangan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf dari

masyarakat, baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahik* atau penerima zakat. Dalam hal ini *amil* dituntut kompetensinya untuk merancang strategi penghimpunan yang efektif mulai dari memahami motivasi donatur (*muzaki*), program, dan metodenya.

Dalam pengelolaan zakat moderen, *amil* memiliki posisi yang sangat penting dalam mengemas program-program atau produk yang berdayaguna bagi *mustahik*. Dengan tujuan membawa semangat menyadarkan umat (*Spirit of Consciousness*), semangat melayani secara profesional (*Spirit of Professional Services*), semangat berinovasi membantu *mustahik* (*Spirit of Inovation*), semangat memberdayakan masyarakat (*Spirit of Empowering*). Dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang ada termaksud Infrastruktur IT Yang Menunjang (*IT Infrastructure*).²¹

1. Cara Pendistribusian Zakat

Mekanisme penyaluran zakat dilakukan oleh *muzakki* kepada *mustahik* sedangkan sebagai *musarif* (sasaran) zakat sudah ditentukan dalam al-Qur'an, yaitu delapan *asnaf* (yang berhak menerima zakat). Mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir-miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang diutamakan. Dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat yang tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada *mustahik*. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa cara penyaluran zakat dapat dilakukan oleh *muzakki* langsung pada *mustahik* ataupun melalui lembaga pengelola zakat.²²

2. Kaidah Pendistribusian Zakat

Salah satu syarat keberhasilan zakat adalah dengan pendistribusian zakat secara professional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Menurut Yusuf Qaradhawi dalam bukunya Manajemen Zakat Professional ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara professional, yaitu:

- 1) Pola pendistribusian produktif yaitu pola pendistribusian dana zakat kepada *mustahik* yang ada, dipinjamkan oleh *amil* untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis.
- 2) Pendistribusian secara lokal yaitu bahwa para *mustahik* di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan dari pada di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal sebagai otonomi daerah.
- 3) Pendistribusian yang adil terhadap semua golongan yaitu adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai *mustahik* oleh Allah dan Rasul-Nya dan adil diantara semua individu dalam satu golongan *mustahik*. Artinya

²¹ Adiwarman Karim, *Zakat dan Empowering* dalam Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Volume 1, Nomor 4, Agustus 2008.

²²Yusuf al-Qardawi, *Spektrum zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan*, cet III, (Jakarta Timur: Zikrul Hakin, 2005), 66.

Perencanaan Distribusi Zakat pada Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid (DPU DT) Cabang Yogyakarta (Ibrahim)

keadilan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan, dan kemaslahatan Islam yang tertinggi.

Menurut Didin Hafidhuddin terdapat beberapa langkah dalam proses pendistribusian zakat. Pertama, langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahik* dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan *Distribusi Centralistic*.

Kedua, menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang di susun berdasarkan data-data akurat.²³ Skala prioritas disini maksudnya adalah mendahulukan orang yang paling membutuhkan, yaitu orang fakir miskin yang terdekat dengan *muzakki*, sesuai dengan QS. *at-Taubah* ayat 60, QS. *al-Baqarah* ayat 177, QS. *al-Isra* ayat 26, dan beberapa hadis Nabi. Maka kita dapat mengacu pada ayat-ayat dan hadis tersebut dalam mendistribusikan zakat.²⁴

Ulama fikih telah membuat beberapa kaidah yang dapat membantu pengelola zakat dalam menyalurkan zakat, diantaranya adalah sebagai berikut :²⁵

- 1) Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan. Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa pengalokasian zakat kepada *mustahik* yang delapan haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluan masing-masing.
- 2) Berdasarkan zakat yang terkumpul. Sebagian ulama fikih berpendapat, harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada *mustahik* yang kedelapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing *mustahik* tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan *mustahik* mana saja yang lebih berhak dari pada yang lain. Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syariat Islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapat zakat dan kondisi yang stabil.
- 3) Penentuan volume yang diterima *mustahik*. Terdapat beberapa pendapat ulama fikih akan hal ini diantaranya sebagai berikut; *Pertama*, masing-masing golongan *mustahik* zakat dialokasikan sebesar (1/8 atau 2,5%) dari total harta zakat yang terkumpul. Jika dana yang telah dialokasikan bagi suatu golongan itu tidak mencukupi, maka dapat diambil dari sisa dana yang dialokasikan untuk *mustahik* yang lain. Apabila tidak juga, maka diambil dari sumber lain dari kas negara atau dengan cara mewajibkan pajak baru untuk menutupi kekurangan itu atas mereka yang kaya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat islam. *Kedua*, Bagi golongan *mustahik* zakat

²³ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, 139.

²⁴ Hendra Maulana, *Analisa Distribusi Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan*, UIN Syarif Hidayatullah 2008), 27.

²⁵ Harri Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, Cet. III, (Jakarta: Qultumedia, 2008), 65.

dialokasikan dana sesuai dengan kebutuhannya tanpa terikat dengan seperdelapan. Apabila harta zakat yang terkumpul itu tidak mencukupi, maka di ambil dari sumber lain dari kas negara atau dengan cara mewajibkan pungutan baru atas harta orang-orang kaya untuk menutupi kekurangan itu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

- 4) Pelaksanaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari *mustahik* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi). Bertambahnya jumlah *muzakki* akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dimasyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Pengembangan Pola Distribusi Zakat

Zakat dapat diberikan secara konsumtif dan dapat pula diberikan secara produktif, penyaluran zakat produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. Pemberian zakat secara produktif, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi,²⁶ pemerintah Islam dapat mengembangkan harta zakat dengan cara membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan, kemudian keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.²⁷

Pengganti pemerintah dapat diperankan oleh Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional. Lembaga Amil Zakat bila memberikan zakat secara produktif harus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahik* zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar mereka semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya, karena ini termasuk salah satu tujuan dari zakat. Salah satu syarat keberhasilan zakat adalah dengan pendistribusian zakat secara professional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran.

Model-Model Pendistribusian Zakat dapat dikategorikan ke dalam empat pola:

- 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional: zakat dibagikan kepada para *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung;
- 2) Distribusi konsumtif kreatif: zakat diwujudkan ke dalam bentuk lain dari wujudnya yang semula: bentuk beasiswa dan lain sebagainya;
- 3) Distribusi yang bersifat produktif tradisional: zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif: alat cukur, hewan ternak dan lainnya;

²⁶ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, Juz II, 567.

²⁷ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern.*, 135.

Perencanaan Distribusi Zakat pada Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid (DPU DT) Cabang Yogyakarta (Ibrahim)

- 4) Distribusi yang bersifat produktif kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan.

Dari keempat pola di atas, maka model distribusi produktif dipandang mempunyai manfaat yang lebih besar. Pola ini dinilai efektif untuk mengurangi disparitas kesejahteraan dan mampu mengubah status dari *mustahik* ke kelompok berkewajiban zakat (*muzaki*).²⁸

Dalam ranah praksisnya, model zakat produktif kreatif dapat diaplikasikan kedalam tiga model: Pertama, model sistem *in-kind*, dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan *mustahik* yang hendak berproduksi. Alat-alat ini diberikan kepada mereka yang hendak memulai usaha atau sedang menjalankan usahanya. Dalam model ini, dana zakat diubah bentuknya oleh *amil* dengan alat-alat produksi untuk mengembangkan usaha *mustahik*. Tentunya tugas *amil* juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha *mustahik*.

Kedua, dengan sistem *qardl al-hasan*, bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu atau bagi hasil dari pokok pinjaman. Dalam model ini, zakat dirupakan dalam bentuk modal proyek usaha yang diberikan *amil* kepada *mustahik*. Jika rugi, tidak berkewajiban mengembalikan modal tersebut. Sebaliknya, jika untung, modal dikembalikan kepada *amil* untuk kemudian dijadikan tambahan modal untuk *mustahik* yang sama atau bisa jadi untuk *mustahik* yang lainnya.

Ketiga, model *mudhrabah*, model ini hampir-mirip dengan model kedua. Perbedaannya terletak pada pengembalian bagi hasil jika untung. Singkatnya, *mustahik* berkewajiban mengembalikan modal dan persentase keuntungan kepada *amil*. Oleh *amil*, modal dan keuntungan tersebut dapat diteruskan untuk penambahan modal atau disalurkan kepada *mustahik* lainnya. Sebaliknya, jika merugi, *mustahik* tidak dibebankan mengembalikan modal.²⁹

Dengan mengembangkan model-model zakat kreatif diatas, tentunya peran *amil* lebih ditekankan pada pemberdayaan dan pendampingan *mustahik*. Hal ini tentunya sesuai dengan amanah UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 3: meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta dalam upaya pendayagunaan zakat.

4. Distribusi Zakat dalam bentuk Pendayagunaan Zakat.

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam melakukan pemberdayaan *mustahik* ada beberapa metode yang dapat digunakan antara lain;

- 1) Pengembangan Ekonomi

²⁸Junaidi Abdillah, *Model Kreatif Distribusi Zakat*, lampost.com. Diakses....

²⁹ *Ibid.*

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat: penyaluran modal, pembentukan lembaga keuangan, pembangunan industri, penciptaan lapangan kerja, saham fakir-miskin, dan pembentukan organisasi

2) Pembinaan SDM

Program Beasiswa, Diklat dan kursus keterampilan, Membuat lembaga pendidikan (sekolah).

3) Layanan Sosial

Yang dimaksud dengan layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan *mustahik* dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan *mustahik* sangat beragam, tergantung kondisi yang tengah dihadapi. Dari kebutuhan yang paling mendasar, seperti kebutuhan makan, pengobatan, bayar SPP dan tunggaknya, musibah, pelayanan mobil jenazah, angkutan gratis anak sekolah, biaya transport pulang kampung hingga bayar kontrakan, dan lain-lain.

Perencanaan Distribusi zakat

1. Manajemen Perencanaan

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan staf, kepemimpinan dan pengawasan dalam organisasi yang dilakukan secara sistematis guna untuk mencapai tujuan tertentu.³⁰ Mengacu pada urutan proses manajemen tersebut, maka perencanaan adalah proses yang paling awal dan menentukan langkah menuju sasaran dari manajemen itu sendiri. Dengan perannya yang sangat menentukan tersebut, perencanaan dianggap penting karena menjadi penentu dan ketercapaian tujuan. Dean R. Spizer menyebutkan sebagai: “*Those who fail to plan, plan to fail*” (siapa yang gagal dalam membuat rencana, sesungguhnya ia sedang merencanakan sebuah kegagalan).

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah organisasi atau pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, keharusan disamping sebagai kebutuhan.³¹ *Planing* adalah tahap untuk menetapkan “target atau sasaran” yang ingin dicapai dalam peningkatan proses ataupun permasalahan yang ingin dipecahkan, kemudian menentukan metode yang akan di gunakan untuk mencapai “target atau sasaran” yang telah ditetapkan tersebut.³² Menurut T.Hani Handoko dalam melakukan perencanaan (*planning*) langkah pertama, yaitu pemilihan

³⁰ Alma Buchari dan Donni Priansi Juni, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet. Ke-II, (Bandung: Alfabeta, 2014), 115.

³¹ Didin Hafiduddin, dan Hendri Tanjung, *Menejemen Syariah Dalam Prakteknya*, (Jakarta: Gema Insani, tth), 77.

³² Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2015), 69.

Perencanaan Distribusi Zakat pada Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid (DPU DT) Cabang Yogyakarta (Ibrahim)

atau penetapan tujuan-tujuan organisasi. Langkah setelahnya, yaitu penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, system, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.³³

Menurut Didin Hafiduddin Sebuah perencanaan dikatakan baik, jika memenuhi persyaratan berikut; didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik. Standar baik dalam Islam adalah yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah. Dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan memiliki manfaat. Manfaat ini bukan sekadar untuk orang yang melakukan perencanaan, tetapi juga untuk orang lain, maka perlu memerhatikan asas *maslahat* untuk umat, terlebih dalam aktivitas dakwah. Didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan. Untuk merencanakan sebuah kegiatan, maka seorang harus banyak mendengar, membaca, dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga dapat melakukan aktivitas dakwah berdasarkan kompetensi ilmunya. Dilakukan studi banding (*benchmark*). Benchmark adalah melakukan studi terhadap praktik terbaik dari lembaga atau kegiatan yang sukses menjalankan aktivitasnya. Dipikirkan dan dianalisis prosesnya, dan kelanjutan dari aktivitas yang akan dilaksanakan.³⁴

2. Konsep Perencanaan Distribusi Zakat DPU-DT (Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhid) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta

Dewasa ini keberadaan lembaga pengelola zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluran zakat untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Keberadaan Lembaga Amil Zakat sangat diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. Zakat merupakan salah satu instrument dalam ekonomi Islam yang menjadi potensi mengangkat derajat kaum lemah dan model penyeimbang ekonomi yang dapat menjembatani antara para *aghiya* dan *mustad'afin* dalam menekan ketimpangan pendistribusian harta.³⁵ Zakat adalah *ibadah maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, startegis dan menentukan,³⁶ baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhiid adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional dan merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (*Fundraising*) dan pendayagunaan dana zakat, *Infraq*, *shadaqah* dan *wakaf* (ZISWAF).³⁷ Untuk menjadi LAZNAS tidaklah mudah, harus mampu mengumpulkan dana zakat, *Infraq*, dan *shadaqah* diatas 50 milyar, mendapat rekomendasi dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), dan siap diaudit secara *syar'i*. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid adalah salah satu Lembaga Amil Zakat yang siap mengikuti

³³ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Cet. Ke-V, (Yogyakarta: BPFE, 1992), 29.

³⁴ Didin Hafiduddin, dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, 90-91.

³⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, 76.

³⁶ Yusuf al-Qardawi, *Al-Ibadah fil Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 235.

³⁷ Ditetapkan menjadi lembaga amil zakat nasional sesuai dengan SK Mentri Agama no 410 tahun 2004.

ketentuan tersebut. Dalam perkembangannya DPU-DT telah memiliki cabang diberbagai kota dan daerah, salah satu diantaranya adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta.³⁸

Secara garis besar DPU-DT Yogyakarta dalam melaksanakan setiap programnya telah direncanakan dengan baik dengan mekanisme serta tahapan-tahapan yang tertata dan rapi. Manajemen perencanaan yang dilakukan oleh DPU-DT cabang Yogyakarta telah menunjukkan kesiapan dan keseriusan sebagai wadah amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Bisa dilihat dari sisi perencanaan yang dilakukan oleh DPU-DT cabang Yogyakarta telah melakukan tahapan-tahapan dan fungsi manajemen perencanaan.

DPU-DT cabang Yogyakarta bukanlah lembaga zakat seperti masjid yang mendapatkan dana kemudian langsung distribusikan secara konvensional dan bagi-bagi uang semata (*scarcity*). Dalam hal ini DPU-DT cabang Yogyakarta merupakan Lembaga Amil Zakat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan fungsinya atas asas profesionalisme. Setidaknya dana zakat yang diamanahkan di DPU-DT cabang Yogyakarta dapat di distribusikan dalam bentuk program pemberdayaan. Bentuk pendistribusian dalam bentuk program pemberdayaan ini membutuhkan waktu yang lama, dalam rangka merubah sikap dan mental *mustahik* menjadi *muzakki*, karakter lemah menjadi kuat dikemudian hari, diperlukan waktu, metode, dan pengkajian yang mendalam. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang tepat, terarah, matang, dan mendalam.

DPU-DT cabang Yogyakarta dalam melakukan perencanaan penyaluran zakat, bertugas menentukan langkah dan program dalam menentukan setiap sasaran, menentukan sarana-prasarana atau media dakwah, serta personel (*amilin*) yang akan diterjunkan. Menentukan materi dan bentuk penyaluran yang cocok kepada penerima zakat untuk sempurnanya pelaksanaan, membuat asumsi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi yang kadang-kadang dapat memengaruhi cara pelaksanaan program dan cara menghadapinya serta menentukan alternatif-alternatif, yang semua itu merupakan tugas utama dari sebuah perencanaan.³⁹

Untuk melihat semangat menjalankan dengan profesional, DPU-DT cabang Yogyakarta dalam merencanakan program-program pendistribusiannya, setidaknya telah melakukan tahapan dan proses fungsi manajemen perencanaan yang baik. Sebagaimana menurut Dr. Muhammad dalam bukunya Manajemen Bank Syariah.⁴⁰ Tahapan dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif

³⁸ <https://dpu-daaruttauhiid.org/web/news/detail/Dompet-Peduli-Ummat-Daarut-Tauhiid-Resmi-Menjadi-LAZNAS>. Diakses

³⁹ M.munir, Wahyu Ilaihi, *Menejemen Dakwah*, (Jakarta; Kencana, 2016), 91.

⁴⁰ Muhammad, *Menejemen Bank Syariah*,(Yogyakarta; STIM YKPN, 2016) 200.

Perencanaan Distribusi Zakat pada Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid (DPU DT) Cabang Yogyakarta (Ibrahim)

kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam mencapai hasil yang baik pada perencanaan perlu adanya berbagai kegiatan yaitu :

Tahapan pertama *forecasting*, DPU-DT cabang Yogyakarta menggunakan beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan dan merencanakan setiap programnya diantara rumusan *forecasting* nya yaitu pertimbangan masukan-masukan dari berbagai donatur di Yogyakarta dengan harapan ada bentuk kerjasama dan keterlibatan antara *muzakki* dengan Lembaga Amil Zakat dalam rangka memperdayakan *mustahik*. Selain itu juga menggunakan pengalaman dan hasil evaluasi program-program tahun sebelumnya. Sedangkan pertimbangan untuk menilai calon *mustahik*, kebutuhan *mustahik*, program yang tepat sesuai dengan keinginan dan kondisi *mustahik*, dan lain-lain yaitu menggunakan *assessment* data. Assement data yaitu proses mengumpulkan data-data *mustahik* dengan melakukan survey dan uji kelayakan sehingga bisa dirumuskan rencana yang tepat, terarah, efektif dan efisien dalam program penyaluran zakat.

Tahap kedua *objective*, DPU-DT cabang Yogyakarta tentunya memiliki tata nilai yang ingin dicapai bersama, sehingga tujuannya terarah. DPU-DT cabang Yogyakarta mengusung motto “*Bersihkan Diri dan Berdayakan Sesama*”. dan visi “*Menjadi model lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata*”. DPU-DT cabang Yogyakarta menjabarkannya dalam Misi antara lain : *Mengoptimalkan potensi ummat melalui Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri*.

Dengan harapan bisa menjadikan *mustahik* kelak bisa menjadi *muzakki*, dengan merubah karakter mental dan sikapnya. Selain membawa misi memperdayakan dan merubah mental ekonomi masyarakat, DPU-DT cabang Yogyakarta juga menyiarkan nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan pembinaan agama dalam rangka menguatkan keimanan masyarakat.

Tahap ketiga aturan dan prinsip-prinsip (*policies*) yang digunakan oleh lembaga, tentunya sesuatu tidak dilaksanakan semau dan sekehendaknya, ada aturan-aturan dan prinsip yang disepakati, sehingga program yang dilaksanakan tidak melanggar hukum *syara'*, sesuai aturan pemerintah, dan tidak melanggar aturan yang disepakati. DPU-DT cabang Yogyakarta juga mempunyai aturan dan prinsip-prinsip penyaluran, dengan prinsip moderen sesuai dengan landasan hukum *syara'*, yang diintegrasikan dengan aturan pemerintah, nilai dan aturan yang menjadi landasan-landasan DPU-DT cabang Yogyakarta.

Tahap keempat, yaitu perencanaan program, DPU-DT cabang Yogyakarta memiliki empat pilar program yaitu Program Ekonomi, Program Pendidikan, Program Sosial dan Program Dakwah. Empat pilar program ini menjadi penyokong aktifitas DPU-DT cabang Yogyakarta dalam rangka mencapai nilai dan tujuan yang diharapkan.

Tahap kelima perencanaan *schedule*, DPU-DT cabang Yogyakarta juga telah membuat *schedule* pelaksanaan selama setahun dan di *breakdown* dalam 12 bulanan. Dengan mengedepankan asas skala prioritas program dan kesiapan baik dari para *amil* (santri karya maupun *mustahik* yang akan diberdayakan).

Tahap keenam, perencanaan prosedur, DPU-DT cabang Yogyakarta telah memiliki desain perencanaan prosedur yang matang, tepat, konsisten, mudah untuk dilaksanakan, dan tetap dalam koridor hukum syara'. Yang menjadi landasan berpijak (SOP) dalam melakukan aktifitas *amil* zakat (santri karya DPU-DT Yogyakarta) dalam melaksanakan setiap tugas dan programnya agar bisa lebih tepat, terarah, efektif, dan efisien. Dengan asas menjaga perasaan rendah diri *mustahik*, mengajaga *iffah* (kemuliaan) dan *ahlak karimah* (kebaikan) ibadah zakat, tidak mempersulit dan menghindari resiko-resiko yang menodai kemuliaan ibadah zakat dan memperlihatkan nilai *humanisme* dan kemaslahatan dari di Syariatkannya ibadah zakat.

Tahap ketujuh perencanaan *budget*, tentunya program-program tidak akan terlaksana tanpa perencanaan budget, DPU-DT cabang Yogyakarta telah membuat RAPB (Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja) selama setahun dan dibuat riciannya ke dalam dua belas bulan. Perencanaan budget selama setahun direncanakan diakhir tahun sebelumnya. Sedangkan rincian perbulan dibuat dan diajukan diakhir bulan. Dengan menggunakan asas skala prioritas, asas ketercukupan, asas kehati-hatian dengan menggunakan *saving* dan pertimbangan dana zakat yang terkumpul.

Penutup

Perencanaan distribusi yang dilakukan oleh DPU-DT cabang Yogyakarta dalam mendistribusikan dana zakat yang diamanahkan *muzakki*, telah menggunakan tahapan-tahapan fungsi perencanaan sebagaimana visi dan misinya. Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan mengedepankan sifat *iffah* (kesucian) mendidik, *akhlakul karimah* (sikap yang baik). Bernilai manfaat (*Maslahat*) artinya distribusi zakat yang dilakukan tidak hanya bersifat konvensional (*scarcity*), hanya menjadikan *mustahik* mengkonsumsi dana zakat sesat, yang berimbas *mustahik* tetap akan menjadi *mustahik* tanpa ada perubahan status sosial. Tetapi DPU-DT cabang Yogyakarta mengembangkan distribusi dengan arif dan bijaksana yaitu mengembangkan program distribusi yang memiliki visi menjadikan *mustahik* nantinya bisa menjadi *muzakki*. Dengan empat pilar pola pemberdayaan zakat. Selain itu, DPU-DT cabang Yogyakarta juga menyiarkan nilai-nilai Islam mel cabang Yogyakarta melalui pembelajaran dan pembinaan agama dalam rangka menguatkan keimanan masyarakat.

Pada dasarnya dana zakat yang ada di DPU-DT cabang Yogyakarta adalah hak *mustahik*, namun dibuat dalam bentuk pemberdayaan dengan jangka waktu panjang sehingga dapat merubah karakter *mustahik* dari karakter lemah menjadi karakter *mustahik* yang kuat. Tanpa mengesampingkan dan melanggar hukum syara' dan sesuai dengan amanat UU zakat yang diharapkan oleh pemerintah. Model perencanaan pengelolah dan pendistribusian zakat

Perencanaan Distribusi Zakat pada Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid (DPU DT) Cabang Yogyakarta (Ibrahim)

yang dilakukan telah menunjukan DPU-DT cabang Yogyakarta merupakan lembaga yang amanah, transparan, dan profesional sehingga menjadikannya salah satu badan pengelola ZIS yang mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Junaidi, *Model Kreatif Distribusi Zakat*, lampost.com.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Mazahabi Al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah Tijaariyyah Al Kubra, tt.).
- Al-Maqsuw, Jafar Abd, *Al- Fawatih Al-hija'iyah wa I'jaz Al-Qur'an*, Cet. I, Jakarta: Pustaka As-Sunah, 1995.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: HTI Press, Tt.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Al-Ibadah fil Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- _____, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- _____, *Al-Ibadah fil Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- _____, *Spektrum zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan*, cet III, Jakarta Timur: Zikrul Hakin, 2005.
- Buchari, Alma dan Donni Priansi Juni, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet. Ke-II, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet I, Jakarta: Gema Insani Perss, 2002.
- _____, *Islam Aplikatif*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Hafiduddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Menejemen Syariah Dalam Prakteknya*, Jakarta: Gema Insani, tth.
- Hikmat, Harri, *Panduan Pintar Zakat*, Cet. III, Jakarta: Qultumedia, 2008.Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan ,1994.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2015.
- Karim, Adiwarman, *Zakat Dan Empowering* dalam Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Volume 1, Nomor 4, Agustus 2008.
- Maulana, Hendra, *Analisa Distribusi Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan*, UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Muhammad, *Menejemen Bank Syariah*, Yogyakarta; STIM YKPN, 2016.
- Munir, M., *Wahyu Ilaihi, Menejemen Dakwah*, Jakarta; Kecana, 2016.
- Purwanto, Apri, *Risalah Zakat*, Cet. I, Yogyakarta: Penerbit DPU-DT, 2010.
- Pusat pembina dan pengembangan bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, Cet. Ke-V, Yogyakarta: BPFE, 1992.
- <https://dpu-daaruttauhiid.org/web/news/detail/Dompot-Peduli-Ummat-Daarut-Tauhiid-Resmi-Menjadi-LAZNAS>.